

ABSTRAK

Tanah merupakan tempat kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Selain itu, tanah juga mempunyai fungsi sebagai sumber kehidupan. Tanah juga sangat berperan penting dalam kehidupan bagi mereka yang sumber ekonominya bergantung pada tanah, baik dalam usaha perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Akan tetapi seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu, asli tapi palsu maupun sertifikat ganda dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah. Pada kenyataannya Sertifikat ganda merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan oleh masyarakat. Tingginya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja BPN sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pertanahan.

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis ini adalah 1) Untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional dalam proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda. 2) Untuk mengetahui Kendala Serta Solusi yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Kota Semarang dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada Bapak Agus Radiyanto, S.H., selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah 1) Peran Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda yaitu dengan cara mediasi, yang mana mediasi ini menyelesaikan sengketa tanah dengan bermusyawarah antar pihak yang ditengahi oleh mediator dari pihak BPN, kemudian jika antar pihak sepakat maka persoalan selesai, namun jika antar pihak tidak menemukan kata sepakat maka ditindak lanjuti ke jalur hukum. Proses penyelesaian Sengketa tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang semuanya sudah dijelaskan dalam Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 2) Kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian sengketa tanah oleh BPN Kota Semarang ada 2 (dua), pertama intern, yaitu tidak lengkapnya data-data yang ada terutama pada dokumen peta. Kedua ekstern, yaitu adanya pihak yang tidak datang ketika akan dimediasi yang akhir menunda mediasi, yang pada akhirnya pada saat pemanggilan para pihak menjadi terhambat. Solusi penyelesaian mengatasi permasalahan sengketa pertanahan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data objek tanah yang menjadi persengketaan dan mencari informasi mengenai tanah tersebut. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Semarang mengupayakan mediasi kepada para pihak, dan apabila mediasi sudah dilakukan tetapi tidak tercapai kesepakatan maka dikembalikan kepada para pihak untuk dilakukan upaya hukum berupa gugatan di pengadilan.

Kata Kunci : BPN. Penyelesaian Sengketa, Sertifikat Ganda

ABSTRACT

Land is the place of life for all living things on this earth. In addition, land also has a function as a source of life. Land is also very important role in life for those whose economic sources depend on land, both in the plantation business, agriculture and so on. However, along with the high value and benefits of land, many people are trying to obtain proof of land ownership by having fake, original but fake or dual certificates where the data on the certificate does not match those in the land book. In reality the double certificate is one of the problems that is often found by the community. The high problem of land issues not only disturbs the community but also greatly influences the performance of the BPN as an institution that has the main task of carrying out land administration.

The purpose of this research that this writer will undertake is 1) To find out the role of the National Land Agency in the Dual Certificate Dispute Settlement process. 2) To find out the Obstacles and Solutions faced by the Semarang City Defense Agency in the Dual Certificate Dispute Settlement Process.

The method used in this paper is sociological juridical. The research was carried out by interviewing Mr. Agus Radiyanto, S.H., as Head of the Land Management and Problem Management Section at the Semarang City Land Office.

The results of this thesis are: 1) The role of the National Land Agency in the process of resolving dual certificate disputes, namely by mediation, which mediation resolves land disputes by deliberating between parties mediated by the mediator from the BPN, then if between parties agree the issue is settled. However, if the parties do not find an agreement, they will be followed up with legal action. The process of resolving land disputes by the Semarang City Land Office has all been explained in the ATR / BPN Regulation No. 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases. 2) Constraints and solutions in the resolution of land disputes by the Semarang City BPN there are 2 (two), first internal, which is incomplete data, especially on map documents. The two externals, namely the presence of parties who did not arrive when they were going to be mediated which finally delayed the mediation, which in the end when the summons of the parties became impeded. Solution to resolve the land disputes problem is done by collecting data on land objects in dispute and finding information about the land. Furthermore, the Semarang City Land Office seeks mediation with the parties, and if mediation has been carried out but no agreement has been reached, it is returned to the parties for legal action in the form of a lawsuit in court.

Keywords: BPN, Double Certificate, Dispute Resolution